

**PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM  
PRESIDEN TAHUN 2014  
(SURVEI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM “45” TAHUN  
ANGKATAN 2014/2015)**

**Yanto Supriyatno**  
Fisip Universitas Islam ‘45’ Bekasi  
yanto.supriyatno@gmail.com

*Abstract*

*Any elections there is always a novice group criteria voters the age of 17 years old and upward or has been married at the time of the election was held. Existing reality shows that's voters novice possessed of different characteristics with groups of voters and it has been choose. Question of the research are how political choice a student on the legislative election 2014 and what political factors inform the choices a student on the legislative election 2014. The results show that voters choice novice based by a factor of political vision and mission candidates. In addition in determining the choice is novice based on the consideration of the voters own.*

*Keywords: Partisipasi politik, pemilih pemula, pemilu presiden 2014*

**A. Pendahuluan**

Partisipasi politik mengacu pada kegiatan seseorang atau sekelompok orang secara sukarela untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa atau mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan yang diambil oleh mereka dan secara

langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (Budiardjo, 2005:40). Dengan demikian dalam definisi tersebut, partisipasi politik lebih mengarah pada tindakan yang bersifat sukarela.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum, tingkat partisipasi pemilih di Indonesia cenderung mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Partisipasi Pemilih di Indonesia

No	Pemilu	Jumlah Pemilih	Menggunakan Hak Pilih (%)	Tidak Menggunakan Hak Pilih (%)
1	Pemilu 1999	118.160.000	92,74	7,26
2	Pemilu 2004	148.000.000	84,07	15,93
3	Pilpres 2004 Putaran I	155.050.000	78,23	21,77
4	Pilpres 2004 Putaran II	152.250.000	76,63	23,37
5	Pemilu 2009	171.070.000	70,96	29,04
6	Pilpres 2009	176.370.000	72,56	27,44
<b>Rata-rata</b>			<b>79,19</b>	<b>20,81</b>

Sumber: Kompas, 26 Maret 2012

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan terjadi penurunan partisipasi pemilih dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Namun secara rata-rata tingkat partisipasi pemilih di Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 79,19% dan yang tidak menggunakan hak pilih sebesar 20,81%.

Tingginya angka ketidakhadiran dalam pemilu disebabkan oleh sekurangnya tiga faktor, yaitu: (1) faktor ketidakpercayaan terhadap para kandidat; (2) kejenuhan terhadap dinamika yang terjadi di dunia politik; dan (3) minimnya sosialisasi (Suharizal, 2011:117). Alasan yang

sama yang mendasari pemilih pemula tidak ikut berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada atau golput adalah: (1) ketidakpercayaan kepada partai politik dan kandidat yang ada; (2) kesalahan pada administrasi data pemilih; dan (3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan KPU (Sasmita, 2011). Sedangkan alasan mengapa para pemilih pemula berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada, adalah: (1) sebagian besar pemilih pemula masih menaruh kepercayaan kepada pemerintah untuk mengubah bangsa ini ke arah lebih baik; (2) mereka berpartisipasi karena diajak orang lain; (3) karena diiming-imingi honor yang besar, dan (4) hanya sekedar ikut-ikutan (Sasmita, 2011).

Penelitian yang dilakukan oleh Hevi Kurnia Hardini (2008)

mengenai perilaku pemilih pemula, yakni berasal dari kalangan siswa SMA pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kota Malang serta model partisipasi yang ada menunjukkan bahwa dalam memilih para pemilih pemula tersebut mendasarkan pada pilihan rasional dengan mempertimbangkan pada aspek kualitas calon, preferensi pada keamanan partai politik (cenderung memilih partai lama yang besar), aspek kemandirian dalam menentukan pilihan, dan aspek identifikasi terhadap janji-janji politik. Selain itu, dalam hal model partisipasi pemilih pemula menunjukkan pola sebagai *spectator*, yakni hanya ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh pemilih pemula tersebut, maka fokus penelitian ini adalah melihat partisipasi politik yang dilakukan oleh mahasiswa, terutama mereka yang baru pertama kali masuk ke jenjang perguruan tinggi. Mahasiswa yang masuk perguruan tinggi pada tahun 2014 termasuk dalam kategori pemilih pemula. Mereka rata-rata masih berusia 17-18 tahun ketika masuk perguruan tinggi dan juga baru

pertama kali mengikuti pemilihan umum.

Dengan demikian, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik pemilih pemula, dalam hal ini adalah mahasiswa Universitas Islam "45" Tahun Angkatan 2014/2015. Judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah **"Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 (Survei pada Mahasiswa Universitas Islam "45" Tahun Angkatan 2014/2015)"**. Adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana partisipasi pemilih pemula mahasiswa Universitas Islam "45" pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014? (2) Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula mahasiswa Universitas Islam "45" pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui bagaimana partisipasi pemilih pemula mahasiswa Universitas Islam "45" pada pelaksanaan Pemilu Umum Presiden tahun 2014. (2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi partisipasi pemilih pemula mahasiswa Universitas Islam “45” pada Pemilihan Umum Presiden tahun 2014.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **B.1. Partisipasi Pemilih**

Definisi partisipasi politik secara umum diuraikan oleh Miriam Budiardjo (1998) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Dalam penjelasannya yang lebih luas Miriam Budiardjo (1998) menjelaskan bahwa kegiatan partisipasi politik mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.

Penjelasan partisipasi politik secara konseptual banyak diuraikan oleh para sarjana. Herbert McClosky dalam *Internasional Encyclopedia of*

*Social Sciences* yang dikutip oleh Budiardjo (1998) menguraikan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum. Lebih mengerucutkan dari pendapat tersebut, Miriam Budiardjo menguraikan pendapat Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam *Handbook of Political Science* yang dikutip oleh Budiardjo (1998) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Berdasarkan dua pendapat ahli ilmu politik tersebut, maka partisipasi politik bagi masyarakat merupakan satu proses kegiatan politik yang cukup penting, terutama dalam pemilihan umum memilih pejabat-pejabat politik di lembaga pemerintahan maupun lembaga perwakilan.

Terkait dengan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat

dalam partisipasi politik, Miriam Budiardjo (1998) mengatakan bahwa salah satunya, bahkan yang paling sering dan sederhana dilakukan oleh warga negara adalah partisipasi politik dalam pemilu. Ia mengatakan lebih lanjut bahwa suatu bentuk partisipasi yang agak mudah untuk diukur intensitasnya adalah perilaku warga negara dalam pemilihan umum, antara lain melalui perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya dibandingkan dengan jumlah warga negara yang berhak memilih.

Ramlan Surbakti (1999) memberikan definisi singkat mengenai partisipasi politik sebagai bentuk keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sedangkan Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori berikut: Pertama, apatis. Artinya orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spektator. Artinya, orang yang setidaknya-tidaknyanya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam

proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye dan aktivis masyarakat. Keempat, pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi tidak konvensional (dalam Surbakti 1999:143).

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya. Bentuk partisipasi politik yang paling umum adalah pemungutan suara atau dikenal dengan istilah voting, entah itu untuk memilih calon para wakil rakyat, entah untuk memilih wakil negara. Menurut Rush dan Althoff (2003), mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin sebagai berikut:

- Menduduki jabatan politik atau administratif,
- Mencari jabatan politik/administratif,
- Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik,
- Menjadi anggota pasif organisasi politik,
- Menjadi anggota aktif organisasi semi-politik (*quasi-political*),
- Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik,

- Menjadi partisipan dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya,
- Menjadi partisipan dalam diskusi politik informal,
- Menjadi partisipan dalam pemungutan suara (*voting*)

Hierarki partisipasi politik tersebut berlaku di berbagai tipe sistem politik, tetapi arti masing-masing tingkat tersebut bisa berbeda dari sistem yang satu ke sistem politik yang lain. Selain itu, Rush dan Althoff (2003) juga mengingatkan bahwa partisipasi pada suatu tingkatan tidak merupakan prasyarat bagi partisipasi pada tingkatan yang lebih tinggi.

Untuk menganalisis tingkatan-tingkatan yang berpartisipasi politik, Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson (1990) mengajukan dua kriteria penjelas:

1. Dilihat dari dua lingkup atau proporsi dari satu kategori warga negara yang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan partisipasi politik.
2. Intensitas, ukuran, jangka waktu, dan arti penting dari kegiatan khusus itu bagi sistem politik.

Hubungan antara kedua kriteria ini cenderung diwujudkan dalam hubungan “berbanding terbalik”. Lingkup partisipasi politik yang besar biasanya terjadi dalam intensitas yang kecil atau yang rendah, misalnya partisipasi dalam pemilihan umum. Sebaliknya, jika lingkup partisipasi politik rendah atau kecil, intensitasnya semakin tinggi, misalnya kegiatan para aktivis parpol, pejabat parpol, kelompok penekan. Jadi, terjadi hubungan, “semakin luas ruang lingkup partisipasi politik, semakin rendah atau kecil intensitasnya. Sebaliknya, semakin kecil ruang lingkup partisipasi politik, maka intensitasnya semakin tinggi.” (Huntington dan Nelson, 1990)

Milbarth (dalam Rush dan Althoff, 2003) membuat pemetaan yang tampaknya masih relevan untuk kondisi sekarang. Rinciannya mengandung empat dimensi yang hierarkhis sifatnya seperti tampak pada Tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2.1**  
**Bentuk Partisipasi Politik Versi Milbarth**

Kegiatan-kegiatan sebagai Gladiator ( <i>Gladiator Activities</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Holding Public and party office</i></li> <li>• <i>Being a candidate for office</i></li> <li>• <i>Attending a caucus or a strategy meeting</i></li> <li>• <i>Becoming an active member in political party</i></li> <li>• <i>Contributing time in a political campaign</i></li> </ul>
Kegiatan-kegiatan transisi ( <i>Transition Activities</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Attending a political meeting or rally</i></li> <li>• <i>Making a monetary contribution to party or candidate</i></li> <li>• <i>Contacting a public official or a political leader</i></li> </ul>
Kegiatan-kegiatan sebagai penonton ( <i>Spectator Activities</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Wearing a button or putting a sticker on one's car</i></li> <li>• <i>Attempting to talk another into voting a certain way</i></li> <li>• <i>Initiating a political discussion</i></li> <li>• <i>Voting</i></li> <li>• <i>Exposing oneself to political stimuli</i></li> </ul>
Apatis ( <i>Apathetic</i> )	

Sumber: Rush dan Althoff, 2003

Partisipasi politik dapat terwujud dalam pelbagai bentuk. Studi-studitentang partisipasi dapat menggunakan skema-skema klasifikasi yang agak berbeda-beda, namun kebanyakan riset belakangan ini membedakan jenis-jenis perilaku seperti berikut (Huntington dan Nelson, 1990):

a) Kegiatan pemilihan mencakup suara, akan tetapi juga sumbangan sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan

mempengaruhi hasil proses pemilihan.

b) Lobbying mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.

c) Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau pejabat dalam suatu organisasi yang tujuan utama dan eksplisitnya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah

- d) Mencari koneksi (*contacting*) merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat bagi hanya satu orang atau segelintir orang.
- e) Tindakan kekerasan (*violence*) juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik, dan untuk keperluan analisa ada manfaatnya untuk didefinisikan sebagai satu kategori tersendiri, artinya sebagai upaya untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dengan jalan menimbulkan kerugian fisik terhadap orang-orang atau harta benda.

Sedangkan Milbrath (dalam Rush dan Althoff, 2003) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, antara lain:

- *Sejauh mana orang menerima perangsang politik.*  
Karena adanya perangsang, maka seseorang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh karena sering mengikuti diskusi politik melalui mass media atau melalui diskusiformal.
- *Faktor karakteristik pribadi seseorang.*  
Orang-orang yang berwatak sosial yang mempunyai kepedulian sosial yang besar terhadap problem sosial, politik, ekonomi, sosial budaya hankamrata, biasanya mau terlibat dalam aktivitas politik.
- *Karakteristik sosial seseorang.*  
Karakter sosial menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang. Bagaimanapun juga lingkungan sosial itu ikut mempengaruhi persepsi, sikap, perilaku seseorang dalam bidang politik. Orang yang berasal dari lingkungan sosial yang lebih rasional dan menghargai nilai-nilai seperti keterbukaan, kejujuran, keadilan dan lain-lain tentu akan mau juga memperjuangkan tegaknya nilai-nilai tersebut dalam bidang politik. Oleh sebab itulah, mereka mau berpartisipasi dalam bidang politik.
- *Keadaan politik.*  
Lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman untuk terlibat dalam aktivitas-aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Lingkungan politik yang sering diisi dengan aktivitas-aktivitas brutal dan kekerasan dengan sendirinya menjauhkan masyarakat dari wilayah politik. Seseorang yang tiada mempunyai pengetahuan atas informasi mengenai suatu masalah politik atau situasi politik mungkin merasa kurang kompeten untuk berpartisipasi dalam sesuatu usaha guna memecahkan masalahnya, atau untuk mengubah situasinya, maka kompetensi politiknya meningkat dengan bertambahnya pengetahuan. Kepribadian yang ramah, suka

bergaul, dominan dan memiliki jiwa sosial yang tinggi akan lebih condong melakukan kegiatan politik.

Berdasarkan pendapat Milbrath, maka dalam penelitian berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu.

## B.2. Pemilih Pemula

Menurut Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 10 tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Kemudian pada Pasal 19 ayat (1 dan 2) UU Nomor 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih sudah/pernah kawin. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga negara yang terdaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu diselenggarakan di

Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun.

Kelompok pemilih pemula ini biasanya mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda. Pemilih pemula dalam ritual demokrasi (pemilu legislatif, Pilpres) selama ini sebagai objek dalam kegiatan politik, yaitu mereka yang masih memerlukan pembinaan dan pengembangan ke arah pertumbuhan potensi dan kemampuannya ke tingkat yang optimal agar dapat berperan dalam bidang politik (Dani, 2010).

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskripsi kualitatif karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi obyek penelitian, dan berusaha menarik realitas tersebut sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu (Bungin, 2009). Oleh karena itu, penelitian ini tidak menguji hipotesis atau membuat suatu

generalisasi, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel yang diteliti (Bungin, 2009).

Dalam penelitian ini populasi adalah pemilih mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi Angkatan 2013/2014 yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahun 2014. Berdasarkan perhitungan diperoleh sampel pemilih pemula sebanyak 58 orang yang didistribusikan secara proporsional di empat program studi yang ada di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam "45" Bekasi.

Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Teknik analisis kualitatif ditujukan untuk memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang diajukan dalam pertanyaan penelitian (*research question*). Sedangkan teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menganalisis kuesioner yang kemudian disajikan dalam tabel

frekuensi dan tabulasi silang dengan melihat kecenderungan prosentase.

Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan kuesioner, dimana responden mengisi sejumlah pertanyaan penelitian. Untuk data sekunder, teknik pengumpulan data menggunakan sumber yang berasal dari buku, jurnal, laporan penelitian, dokumen, dan sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **D. Hasil dan Pembahasan**

Dalam negara demokratis partisipasi merupakan penerapan dari penyelenggaraan kekuasaan politik yang sah oleh rakyat. Partisipasi politik dilakukan salah satunya adalah ikut memilih pimpinan negara dan mempengaruhi kebijakan publik dalam bentuk memberikan suara dalam pemilu. Untuk mengetahui pengenalan responden terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 sebagaimana data pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1. Pengenalan Responden terhadap Adanya Pemilu Legislatif 2014**

No	Program Studi	Pernyataan			
		Ya	%	Tidak	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ilmu Pemerintahan	25		0	
2	Ilmu Administrasi Negara	8		0	
3	Psikologi	19		1	
4	Manajemen Administrasi	5		0	
<b>Total</b>		<b>57</b>	<b>98</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Pengenalan mahasiswa terhadap pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 menunjukkan sebanyak 57 mahasiswa dari 58 mahasiswa atau sebesar 98% mengetahui adanya Pemilu Legislatif 2014. Hanya 1 orang mahasiswa atau

2% saja yang tidak mengetahui adanya Pemilu Legislatif 2014. Demikian pula untuk mengetahui apakah responden ikut memilih anggota legislatif pada Pemilu Legislatif tahun 2014 sebagaimana data Tabel 2 berikut:

**Tabel 2. Keikutsertaan Responden pada Pemilu Legislatif 2014**

No	Program Studi	Pernyataan			
		Ya	%	Tidak	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Ilmu Pemerintahan	20		5	
2	Ilmu Administrasi Negara	8		0	
3	Psikologi	18		2	
4	Manajemen Administrasi	5		0	
<b>Total</b>		<b>51</b>	<b>87</b>	<b>7</b>	<b>13</b>

Meskipun jumlah mahasiswa yang mengetahui pelaksanaan Pemilu Legislatif 2014 sangat banyak mencapai 98%, namun dalam keikutsertaan dalam proses pemungutan suara sebanyak 51 orang atau sebesar 87% yang mencoblos. Sedangkan sebanyak 7 orang atau sebesar 13% yang tidak mengikuti proses pemilihan umum.

Dalam hal mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan perilaku pemilih pemula pada saat Pemilu Legislatif tahun 2014 dilaksanakan adalah bagaimana sikap pemilih pemula menjelang pelaksanaan pemilu legislatif tersebut. Adapun perolehan data dari lapangan sebagaimana Tabel 3 berikut:

**Tabel 3. Sikap Responden Menjelang Pemilu Legislatif 2014**

No	Program Studi	Pernyataan					
		Antusias	%	Biasa	%	Tidak Tertarik	%
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Ilmu Pemerintahan	15		10		0	
2	Ilmu Administrasi Negara	7		1		0	
3	Psikologi	6		13		1	
4	Manajemen Administrasi	0		5		0	
<b>Total</b>		<b>28</b>	<b>48</b>	<b>29</b>	<b>50</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Berdasarkan data Tabel 3 menunjukkan bahwa sikap pemilih menjelang pelaksanaan pemilu legislatif ternyata bersikap biasa saja, yaitu sebanyak 29 orang atau sebesar 50%. Sebanyak 28 responden atau sebesar 48% bersikap sangat antusias, dan sebanyak 1 orang atau sebesar 2% yang bersikap tidak tertarik.

Demikian pula dalam melihat alasan pemilih pemula bersikap menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif tahun 2014 berdasarkan hasil kuesioner yang diperoleh untuk mengkonfirmasi sikap pemilih pemula menjelang pelaksanaan pemilu legislatif tersebut menurut pendapat mereka adalah sebagaimana data Tabel 4 berikut:

**Tabel 4. Alasan Responden Bersikap Menjelang Pemilu Legislatif 2014**

No	Pernyataan	Program Studi				Jumlah	%
		IP	IAN	PSI	MA		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Baru mencoblos pertama kali	7	1	3	0	11	18
2	Rasa tanggung jawab sebagai warga negara	12	7	10	5	34	58
3	Ajakan orang tua	-	-	1	-	1	1
4	Ajakan rekan sebaya/kampus	-	-	-	-	-	
5	Ajakan tim sukses kandidat	1	-	1	-	2	4
6	Tidak terdaftar sebagai pemilih	2	-	-	-	2	4
7	Bingung akan banyaknya kandidat	2	-	3	-	5	9
8	Pemberian materi dari kandidat	-	-	-	-	-	
9	Lain-lain	1	-	2	-	3	6
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Sebagian besar responden, yaitu sebanyak 34 orang atau sebesar 58% menyatakan bahwa alasan mereka memilih disebabkan oleh rasa tanggung jawab sebagai seorang warga negara. Sebanyak 11 orang atau sebesar 18% yang menyatakan karena baru pertama kali mengikuti pemilihan umum. Sedangkan sisanya

lebih dikarenakan karena bingung akan banyaknya kandidat, tidak terdaftar sebagai pemilih, ajakan tim sukses kandidat, ajakan orang tua, dan lain-lain. Sedangkan alasan utama responden memilih kandidat anggota legislatif sebagaimana data Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Alasan Responden Memilih Kandidat Anggota Legislatif

No	Pernyataan	Program Studi				Jumlah	%
		IP	IAN	PSI	MA		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	<i>Incumbent</i>	-	-	-	-	-	-
2	Visi, misi dan program yang ditawarkan	14	2	7	4	27	46
3	Asal bukan <i>incumbent</i>	-	-	-	-	-	-
4	Latar belakang pendidikan kandidat	2	-	5	1	8	13
5	Latar belakang orangtua kandidat	-	-	1	-	1	2
6	Latar belakang pengalaman politik kandidat	3	1	1	-	5	9
7	Latar belakang pekerjaan kandidat	2	-	-	-	2	3
8	Popularitas kandidat	-	-	1	-	1	2
9	Pemberian materi kandidat	-	-	1	-	1	2
10	Latar belakang partai pengusung kandidat	-	1	-	-	1	2
11	Kemampuan kandidat mengatasi persoalan	3	4	-	-	7	12
12	Tidak tahu	1	-	4	-	5	9
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Alasan utama responden memilih kandidat anggota legislatif adalah karena visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh kandidat, dimana dari 58 orang responden sebanyak 27 orang atau sebesar 46% menyatakan memilih karena faktor tersebut. Sebanyak 8 orang atau sebesar 13% memilih karena faktor

latar belakang pendidikan kandidat. Sedangkan yang lain memilih kandidat didasarkan pada kemampuan kandidat mengatasi persoalan, latar belakang pengalaman politik kandidat, popularitas kandidat, pemberian materi kandidat, latar belakang partai

pengusung kandidat, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali.

Pada Tabel 6 berikut menampilkan tentang sumber

informasi utama yang diperoleh responden mengenai kandidat anggota legislatif sebagai berikut:

**Tabel 6. Sumber Informasi Responden Mengenai Kandidat Anggota Legislatif**

No	Pernyataan	Program Studi				Jumlah	%
		IP	IAN	PSI	MA		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Iklan TV/Radio, spanduk, pamflet, dsb	20	5	15	3	43	74
2	Suami/istri	-	-	-	-	-	-
3	Orang tua	1	-	1	-	2	4
4	Keluarga/kerabat	-	-	-	-	-	-
5	Teman sepeergaulan	1	-	-	-	1	1
6	Tokoh masyarakat	1	-	-	-	1	1
7	Organisasi sosial tempat saya bergabung	1	-	-	-	1	1
8	Lingkungan tempat saya kuliah	1	-	-	-	1	1
9	Pilihan warga tempat saya tinggal	-	-	1	-	1	1
10	Program yang ditawarkan	-	-	-	-	-	-
11	Dicalonkan oleh partai pilihan saya	-	-	1	-	1	1
12	Suka pada figur kandidat	-	3	-	2	5	9
13	Tidak tahu	-	-	2	-	2	4
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Adapun yang menjadi sumber informasi responden ketika memilih kandidat anggota legislatif, berdasarkan hasil data lapangan

menunjukkan bahwa sebanyak 43 responden atau sebesar 74% berasal dari iklan TV/radio, spanduk, pamflet, dan sebagainya. Sebanyak

5 orang atau sebesar 9% yang menyatakan karena suka pada figur kandidat. Adapun yang lain menyatakan bahwa informasi mengenai kandidat diperoleh dari orang tua, teman sepergaulan, tokoh masyarakat, organisasi sosial,

lingkungan kuliah, dan pilihan warga. Sedangkan yang menjadi sumber pertimbangan responden ketika memilih kandidat anggota legislatif sebagaimana data pada Tabel 7 berikut:

**Tabel 7. Sumber Pertimbangan Responden Ketika Memilih Kandidat Anggota Legislatif**

No	Pernyataan	Program Studi				Jumlah	%
		IP	IAN	PSI	MA		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Orang tua	3	1	4	0	8	14
2	Suami/istri	-	-	-	-	-	-
3	Teman sebaya	-	-	1	-	1	1
4	Pertimbangan sendiri	16	5	11	5	37	64
5	Tidak ada pertimbangan	5	0	2	0	7	12
6	Lain-lain	1	2	2	0	5	9
<b>Total</b>		<b>25</b>	<b>8</b>	<b>20</b>	<b>5</b>	<b>58</b>	<b>100</b>

Sumber pertimbangan responden ketika memilih kandidat legislatif menurut 37 responden atau sebesar 64% berasal dari diri mereka sendiri. Sebanyak 8 orang atau sebesar 14% menyatakan orang tua sebagai sumber pertimbangan dalam memilih. Sedangkan yang lain menyatakan pengaruh teman sebaya, tidak adanya pertimbangan, dan lain-

lain sebagai sumber pertimbangan dalam memilih kandidat.

#### **E. Simpulan dan Saran**

Terdapat beberapa faktor yang melatari perilaku memilih pada pemilih pemula saat Pemilu Legislatif tahun 2014. Meskipun dapat dikatakan sebanyak 29 orang bersikap biasa-biasa saja dalam menyambut pemilu legislatif

tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan antusiasme mereka dalam menggunakan hak pilih. Terbukti sekitar 51 dari 58 jumlah responden yang diambil menyatakan menggunakan hak pilih mereka. Faktor keinginan yang besar untuk merasakan pengalaman dengan menggunakan hak pilih tercermin dari hasil temuan lapangan yang menunjukkan mayoritas responden menyatakan tetap memilih sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Keunikan yang khas pada pemilih pemula adalah sebagian besar dari mereka menggunakan pengaruh promosi kampanye visual dalam menentukan pilihan mereka. Iklan tv/radio, poster, spanduk dan baliho kandidat anggota legislatif menjadi alat yang sangat efektif bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihan mereka.

Dari beberapa faktor yang melatarbelakangi perilaku memilih para pemilih pemula, dapat diketahui bahwa para pemilih pemula memiliki pertimbangan sendiri dalam memutuskan memilih kandidat anggota legislatif. Selain itu, dalam hal rasionalisasi pilihan menunjukkan bahwa pilihan politik

pemilih pemula didasarkan pada visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh kandidat anggota legislatif.

Seperti telah dijelaskan pada bagian awal bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, baik dari segi variabel pengaruh, variabel kontrol, metode yang digunakan, teknik analisa data, jumlah sampel, dan wilayah penelitian. Oleh sebab itu, untuk lebih memperkaya kajian mengenai pilihan politik pemilih pemula pada pelaksanaan pemilihan umum pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan menambahkan dengan variabel pengaruh lainnya, seperti variabel identifikasi partai, variabel identifikasi kandidat, dan sebagainya, serta menggunakan metode tertentu yang dapat menjelaskan mengenai pilihan politik pemilih pemula tersebut.

#### Daftar Pustaka

- Asfar, Muhammad, "Pilkada dan Penciptaan Pemerintahan yang Representatif", dalam Ahmad Nadir. 2005. *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Malang: Averroes Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia.
- Bungin, H.M. Burhan. 2009. *Penelitian Kualitatif*:

- Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Prenada Media.
- Gaffar, Afan. 1992. *The Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- <http://www.antara.net.id/index.php/2014/01/02/pemilih-pemula-pemilu-2014-potensi-besar-sosialisasi-program-yang-belum-merata/id/> diakses tanggal 18 Maret 2014.
- Imawan, Riswandha, “Dinamika Pemilih dalam Pemilu 1992” dalam M. Sudibjo (Penyunting). 1995. *Pemilihan Umum 1992: Suatu Evaluasi*, Jakarta: Center for Strategic and International Studies.
- Indarti, Erlyn, “Dinamika Politik Lokal dalam Pemilihan Gubernur di Jawa Tengah”, dalam Satoto, Darmanto Jatman, dkk. 2003. *Pilkada di Era Otonomi: Berlayar Sambil Menambal Lubang di Kapal*, Semarang: Komite Peduli Pemilihan Gubernur Jateng 2003-2008, Dewan Riset Daerah Jawa Tengah, dan CV Aneka Ilmu.
- Newton, Kenneth and Jan W. van Deth. 2005. *Foundations of Comparative Politics*, New York: Cambridge University Press.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*, Jakarta: Gramedia.
- Setiajid, “Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula di Kota Semarang)”, *Integralistik*, No. 1/Th. XXII/2011, Januari-Juni 2011, hal. 18-33.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah